

INTISARI

Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia khususnya di tingkat lokal mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi. Terlebih pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai 2022 membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya mengadaptasi teknologi dalam kerja-kerja politik dan demokrasi. Lalu, bagaimana e-voting beradaptasi dan berpengaruh dalam proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal dengan kondisi praktik anti-demokrasi yang masih terus berlangsung. Tesis ini ingin mengkaji bagaimana praktik e-voting yang beriringan dengan demokrasi desa/kelurahan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sampai hari ini e-voting hanya di terapkan secara parsial di beberapa kabupaten di Indonesia, keunggulan e-voting terkait efektivitas dan efisiensi menjadi wacana dominan mengapa e-voting mulai diberlakukan. Kajian dominan mengenai e-voting terkait efektivitas dan efisiensi justru mereduksi dan memisahkannya e-voting sebagai bagian konteks demokrasi. Walaupun, tidak bisa di pungkiri bahwa isu terkait kecurangan dan masalah teknis terjadi seiring dengan penggunaan e-voting dalam proses pemilihan lurah/kepala desa tersebut. Dengan menggunakan studi kasus dan pendekatan demokrasi prosedural dan substantif, ditemukan temuan dan analisis yang menunjukkan bahwa e-voting sebagai sebuah instrumen pemilihan umum tidak mengubah proses konsolidasi demokrasi yang berjalan. E-voting hanya berlaku sebagai instrumen pemilihan umum dan sebagai wacana elit politik di tingkat lokal. Wacana e-voting yang secara substantif mengarah pada proses politik yang efektif dan efisien justru menjadi investasi yang tinggi dan tidak menjamin tercipta-nya konsolidasi politik dan demokrasi pada tatanan lokal. Studi tesis ini mengangkat penggunaan e-voting sebagai instrumen dalam pemilihan umum yang secara semu tidak berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Kata kunci : politik lokal, demokrasi, e-voting

ABSTRACT

The democratic process that takes place in Indonesia, especially at the local level, has undergone a significant transformation along with the development of technology. Moreover, the Covid-19 pandemic in 2020 to 2022 has raised our awareness of the importance of adapting technology in political and democratic work. Then, how does e-voting adapt and influence the process of consolidating democracy at the local level with the ongoing anti-democratic practices? This thesis aims to examine how e-voting practices go hand in hand with village democracy in Sleman Regency, Yogyakarta. To date, e-voting has only been partially implemented in a few districts in Indonesia. The advantages of e-voting in terms of effectiveness and efficiency have become the dominant discourse on why e-voting has been implemented. The dominant study of e-voting related to effectiveness and efficiency reduces and separates e-voting as part of the democratic context. Although, it cannot be denied that issues related to fraud and technical problems occur along with the use of e-voting in the village head election process. Using a case study and procedural and substantive democracy approaches, the findings and analysis show that e-voting as an electoral instrument does not change the ongoing process of democratic consolidation. E-voting only applies as an election instrument and as a discourse of political elites at the local level. The discourse of e-voting, which substantively leads to an effective and efficient political process, becomes a high investment and does not guarantee the creation of political and democratic consolidation at the local level. This thesis study raises the use of e-voting as an instrument in general elections that has no apparent effect on the process of democratic consolidation at the local level.

Keywords: local politics, democracy, e-voting